



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**  
 Jl. Sultan Abdurrahman No. 89 KOTA PONTIANAK  
 KALIMANTAN BARAT  
<http://pn-pontianak.go.id/>



**PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI**  
 Periode 1 Januari 2025 sampai 31 Maret 2025

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

**NILAI INDEKS**

**3,98 / 99,59%**

Jumlah	219 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 120 PEREMPUAN : 99	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0 SD : 6 Diploma 3 : 15 SMP : 7 S1 : 112 SMU : 75 S2 : 3 Diploma 1 : 0 S3 : 1	
Pekerjaan	PNS : 12 SWASTA : 75 TNI : 0 WIRAUSAHA : 22 POLRI : 3 TENAGA KONTRAK : 0 LAINNYA : 107	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?	3,945
2. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	3,954
3. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?	3,954

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Sehubungan dengan kemudahan dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya sudah ditindaklanjuti dengan dibuatnya banner-banner di pengadilan dan di website pengadilan berkaitan dengan biaya/tarif resmi tanpa adanya biaya tambahan dari biaya atau tarif resmi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditentukan, biaya PNBP tersebut disetorkan melalui kasir dengan diberikan bukti tanda terima, biaya panjar ongkos perkara disetorkan melalui rekening Bank BTN KC.Pontianak. (kecuali terhadap perkara perdata yang masih dalam proses pemeriksaan dan biaya panjar ongkos perkaranya sudah tidak mencukupi untuk pemanggilan dan pemberitahuan putusan kepada para pihak).
2. Terkait indikator penyalahgunaan jabatan, pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak ditemukan adanya penyalahgunaan jabatan. Petugas layanan dan ASN selalu bertindak sesuai dengan aturan, tugas dan fungsinya dalam melayani pengguna layanan. Serta agar seluruh petugas pelayanan tetap mempertahankan kinerja yang baik dalam melayani pengguna layanan.
3. Sehubungan dengan menerima bukti transaksi yang sah setelah proses pembayaran pengadilan dilakukan di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pengadilan Negeri Pontianak sudah menindaklanjuti dengan dibuatnya banner-banner dan PNBP yang telah dirincikan biaya perkara kepada para pihak.

**Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.**

27 Maret 2025  
 Ketua Pengadilan Negeri



**PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS I A**

Jalan Sultan Abdurrahman No. 89 Pontianak

☎ (0561)734100 📠 (0561) 763214 / 763196

[www.pn-pontianak.go.id](http://www.pn-pontianak.go.id)

Email : [pengadilannegeriptk@gmail.com](mailto:pengadilannegeriptk@gmail.com)

SIPP Address : [sipp.pn-pontianak.go.id](http://sipp.pn-pontianak.go.id)

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2019 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan



**PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS I A**

Jalan Sultan Abdurrahman No. 89 Pontianak

☎ (0561)734100 📠 (0561) 763214 / 763196

[www.pn-pontianak.go.id](http://www.pn-pontianak.go.id)

Email : [pengadilannegeriptk@gmail.com](mailto:pengadilannegeriptk@gmail.com)

SIPP Address : [sipp.pn-pontianak.go.id](http://sipp.pn-pontianak.go.id)

pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

**B. Tujuan**

Tujuan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Pontianak sebagai bahan untuk mempertahankan **Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi** dan peningkatan kualitas pelayanan menuju **Wilayah Birokrasi Bersih Melayani**.

**C. Sasaran**

1. Terselenggaranya pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan transparan.
2. Tercapainya perbaikan system, mekanisme dan prosedur pelayanan publik sesuai yang diharapkan pengguna layanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan anti gratifikasi.

**D. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.



**PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS I A**

Jalan Sultan Abdurrahman No. 89 Pontianak

☎ (0561)734100 📠 (0561) 763214 / 763196

[www.pn-pontianak.go.id](http://www.pn-pontianak.go.id)

Email : [pengadilannegeriptk@gmail.com](mailto:pengadilannegeriptk@gmail.com)

SIPP Address : [sipp.pn-pontianak.go.id](http://sipp.pn-pontianak.go.id)

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

**E. Rencana Kerja**

**1. Persiapan dan Pengumpulan data**

Sebelum melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Penyusunan jadwal pelaksanaan survei melalui Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER) dengan jawaban yang tersedia.
- Pelaksanaan survei melalui Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER) dengan jawaban yang tersedia.
- Penetapan Responden adalah pengguna layanan Pengadilan Negeri Pontianak.
- Pengumpulan data terhadap 10 unsur pertanyaan, berupa jawaban melalui Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER).

**2. Pelaksanaan Survei**

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 (tiga) bulan atau 4 (empat) kali dalam satu tahun, survei persepsi anti korupsi ini dilaksanakan dalam interval waktu Bulan Januari sampai Bulan Maret 2025.



**PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS I A**

Jalan Sultan Abdurrahman No. 89 Pontianak

☎ (0561)734100 📠 (0561) 763214 / 763196

[www.pn-pontianak.go.id](http://www.pn-pontianak.go.id)

Email : [pengadilannegeriptk@gmail.com](mailto:pengadilannegeriptk@gmail.com)

SIPP Address : [sipp.pn-pontianak.go.id](http://sipp.pn-pontianak.go.id)

**BAB II**

**METODOLOGI**

**A. Metode Penelitian**

Penelitian Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

**B. Populasi Dan Sampel**

Responden ditentukan sesuai dengan jumlah pengguna layanan di satuan serja Pengadilan Negeri Pontianak. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja pengguna layanan dari satuan kerja Pengadilan Negeri Pontianak yang digunakan sebagai sumber data.

**C. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis**

Lokasi penelitian adalah tempat terjadinya suatu peristiwa berupa pemberian layanan kepada pengguna layanan di Pengadilan Negeri Pontianak.

**D. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control**

Data pada penelitian ini diambil menggunakan aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER) dengan populasi pada penelitian ini jumlah total keseluruhan sebanyak 218 orang responden.



**PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS I A**

Jalan Sultan Abdurrahman No. 89 Pontianak

☎ (0561)734100 📠 (0561) 763214 / 763196

www.pn-pontianak.go.id

Email : [pengadilannegeriptk@gmail.com](mailto:pengadilannegeriptk@gmail.com)

SIPP Address : [sipp.pn-pontianak.go.id](http://sipp.pn-pontianak.go.id)

**E. Teknik Analisis Data**

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi, yang menjadi mutu pelayanan Pengadilan Negeri Pontianak.

Skala indeks persepsi korupsi tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

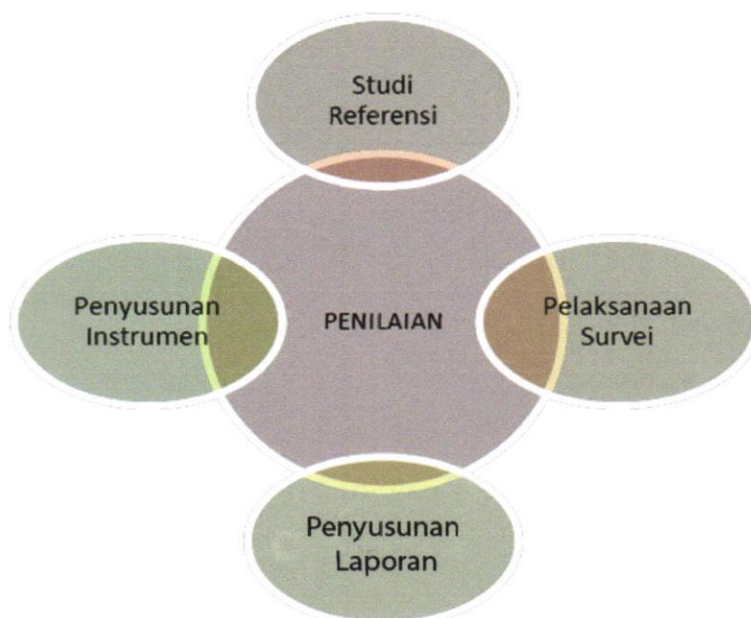
**F. Tahapan pelaksanaan**

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi anti korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

**Tabel 1**

**Model alur penyusunan**

**Survei Persepsi Anti Korupsi menuju Zona Integritas**





**PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS I A**

Jalan Sultan Abdurrahman No. 89 Pontianak

☎ (0561)734100 📠 (0561) 763214 / 763196

www.pn-pontianak.go.id

Email : [pengadilannegeriptk@gmail.com](mailto:pengadilannegeriptk@gmail.com)

SIPP Address : [sipp.pn-pontianak.go.id](http://sipp.pn-pontianak.go.id)

**Tabel 2**

**Ruang lingkup Survei Presepsi Anti Korupsi**

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

**Tabel 3**

**Nilai Persepsi**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

**BAB III**

**INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI**

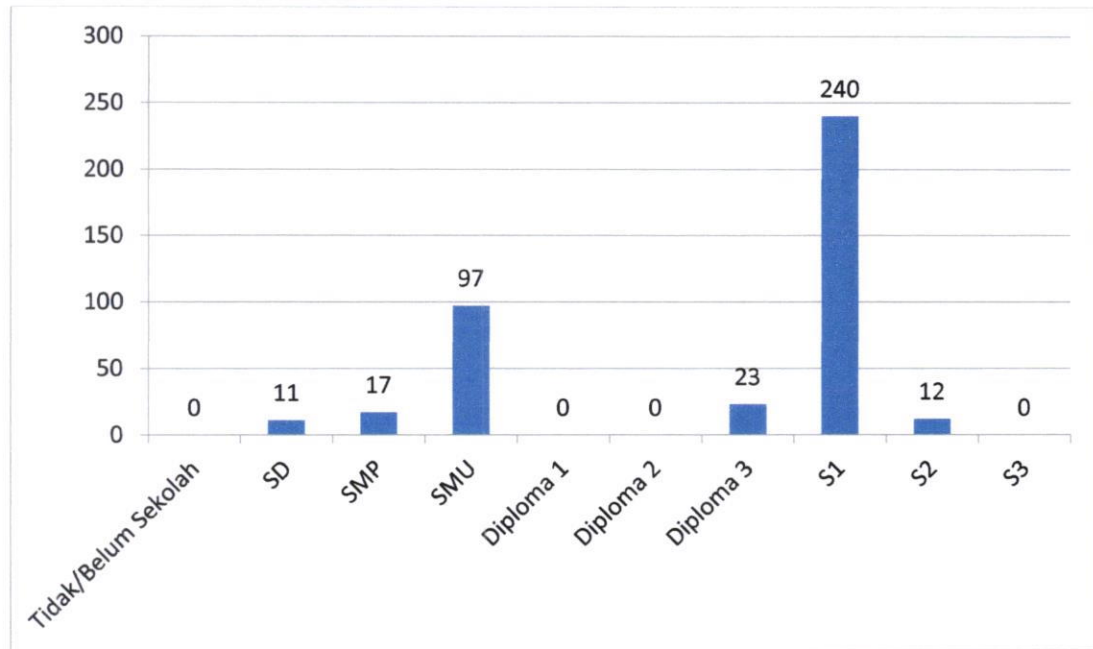
**A. Profil Responden**

**1. Tingkat Pendidikan Responden**

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari

latar belakang pendidikan, pengguna layanan di Pengadilan Negeri Pontianak sebanyak 240 orang memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S1), sebanyak 12 orang Pasca Sarjana (S2), sebanyak 23 orang Diploma, sebanyak 97 orang SMU dan sebanyak 17 orang SMP dan sebanyak 11 orang SD. Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1  
Tingkat Pendidikan Responden

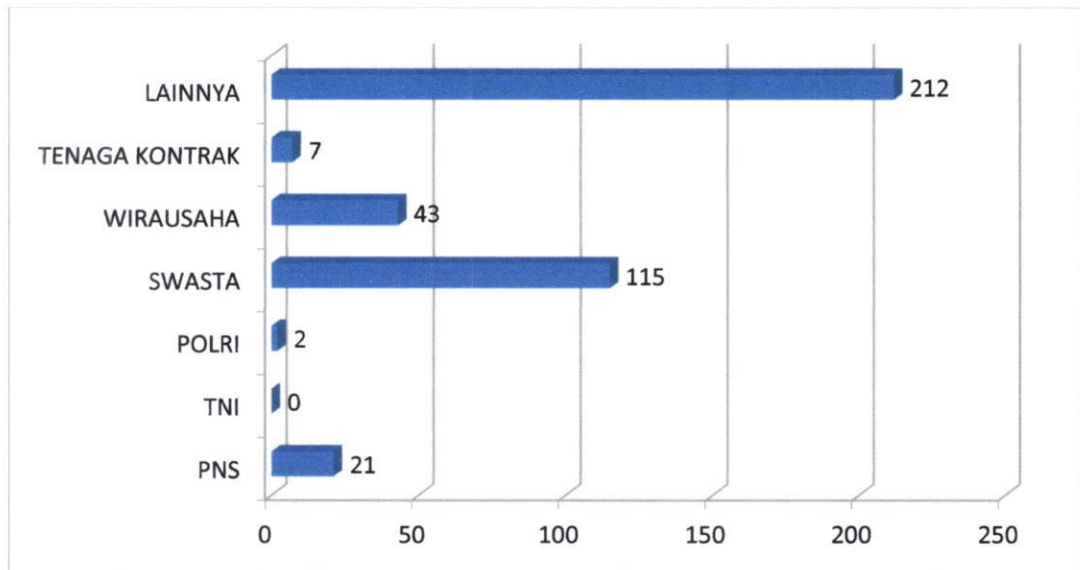


Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER).

## 2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Pontianak, sebanyak 21 orang responden memiliki pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara, sebanyak 2 orang pekerjaan sebagai Polri, sebanyak 115 orang pekerjaan swasta, sebanyak 43 orang pekerjaan wirausaha, sebanyak 7 orang pekerjaan tenaga kontrak dan sebanyak 212 orang pekerjaan lainnya. Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2  
Jenis Pekerjaan Responden

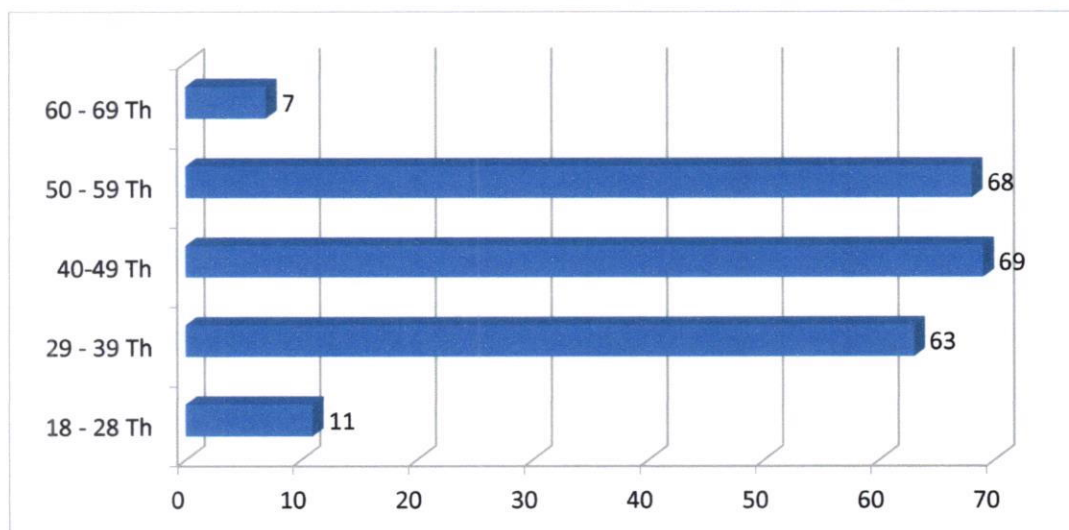


Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)

### 3. Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia antara 29 tahun sampai dengan 39 tahun. Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3  
Jenis Usia Responden



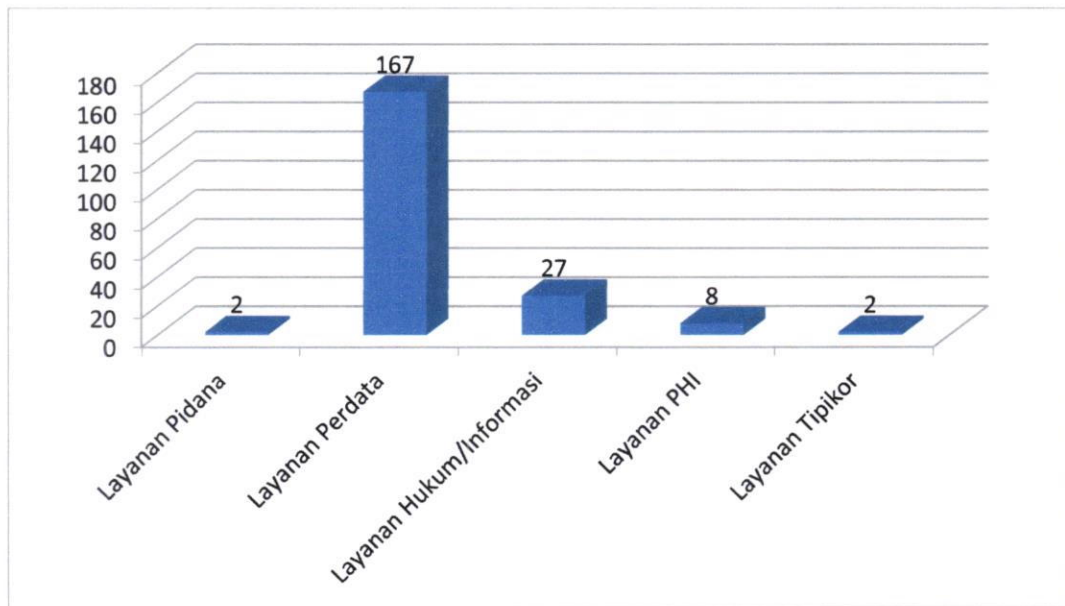
Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)

### 4. Jenis Layanan Responden

Layanan PTSP terbagi menjadi 5 jenis layanan, sebanyak 2 orang responden menerima layanan Pidana, sebanyak 167 orang responden menerima layanan Perdata, sebanyak 27 orang responden menerima layanan Hukum/Informasi, sebanyak 8 orang responden menerima layanan PHI, dan

sebanyak 2 orang responden menerima layanan Tipikor. Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4  
Jenis Layanan Responden



Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)

## B. Indeks Persepsi Anti Korupsi Perindikator

### 1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index **4,00**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Bersih dari Manipulasi Peraturan.

Tabel 1

**Indeks pada indikator Manipulasi Peraturan**

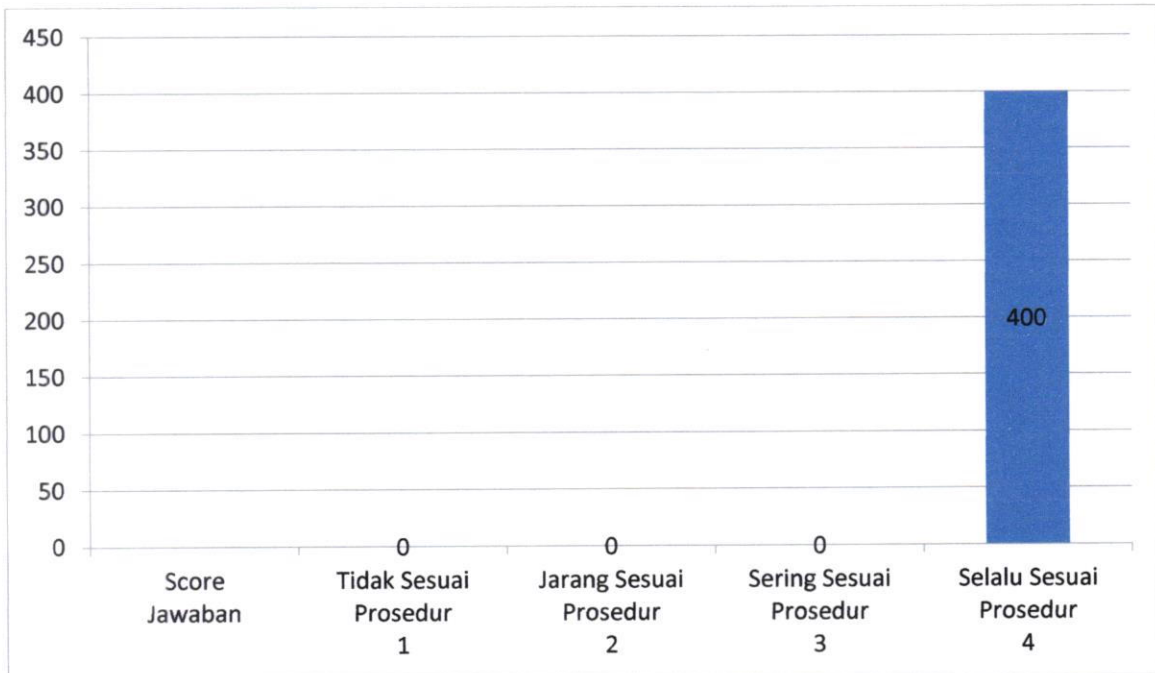
Nomor	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak sesuai prosedur	1	0	0
2	Jarang sesuai prosedur	2	0	0
3	Sering sesuai prosedur	3	0	0
4	Selalu sesuai prosedur	4	400	100
Jumlah			400	100

Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Gambar 1

**Indeks pada indikator Manipulasi Peraturan**



**2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index **3,98**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

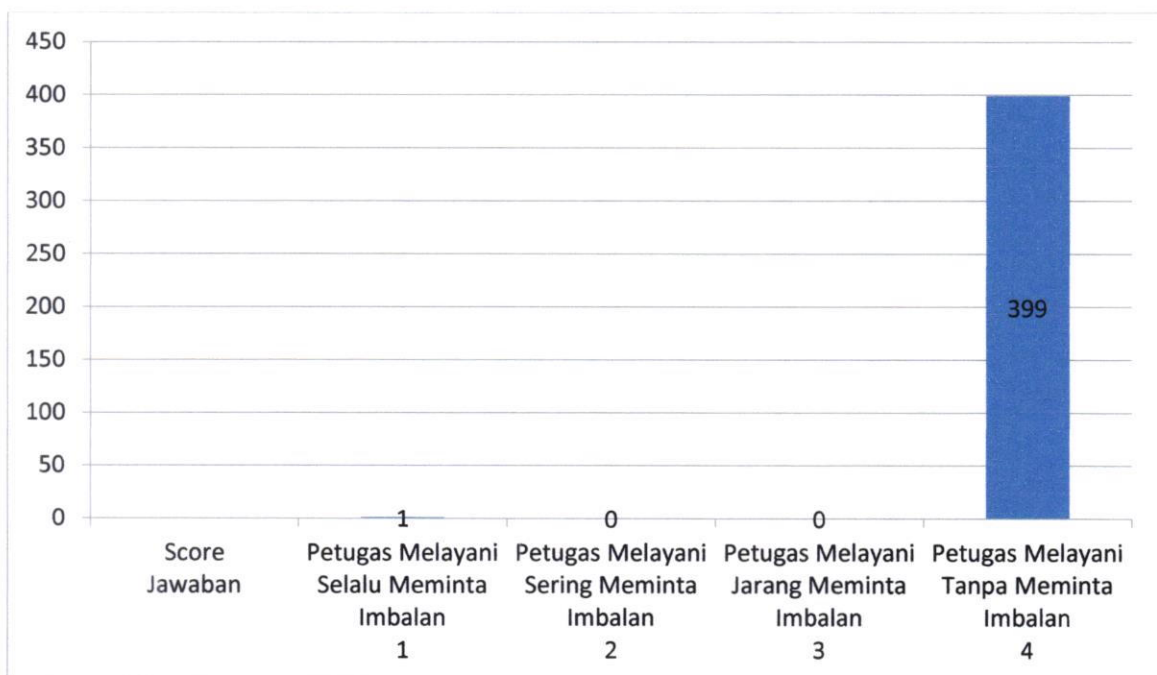
Tabel 2

**Indeks pada indikator Penyalahgunaan Jabatan**

Nomor	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Petugas melayani selalu meminta imbalan	1	1	0,25
2	Petugas melayani sering meminta imbalan	2	0	0
3	Petugas melayani jarang meminta imbalan	3	0	0
4	Petugas melayani tanpa meminta imbalan	4	399	99,75
Jumlah			400	100

Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)  
 Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Gambar 2  
**Indeks pada indikator Penyalahgunaan Jabatan**



### 3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index **4,00**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Bersih dari pengaruh pengurusan surat/berkas perkara.

Tabel 3

**Indeks pada indikator Menjual Pengaruh**

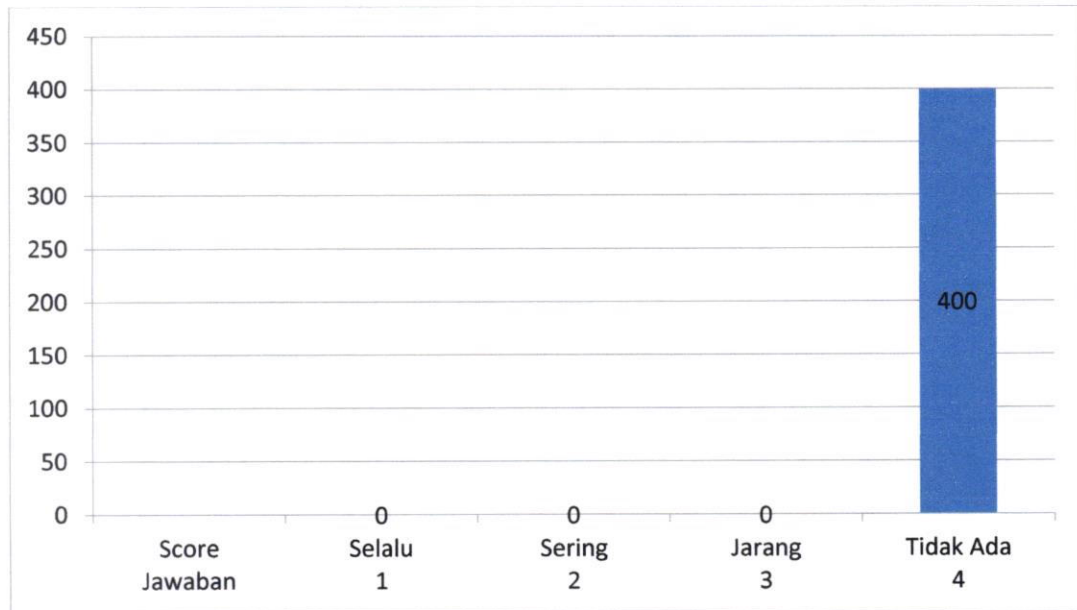
Nomor	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	0	0
4	Tidak ada	4	400	100
Jumlah			400	100

Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Gambar 3

**Indeks pada indikator Menjual Pengaruh**



**4. Indikator Transaksi Biaya**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **3,98**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Bersih dari Korupsi dalam hal Transaksi Biaya.

Tabel 4

**Indeks pada indikator Transaksi Biaya**

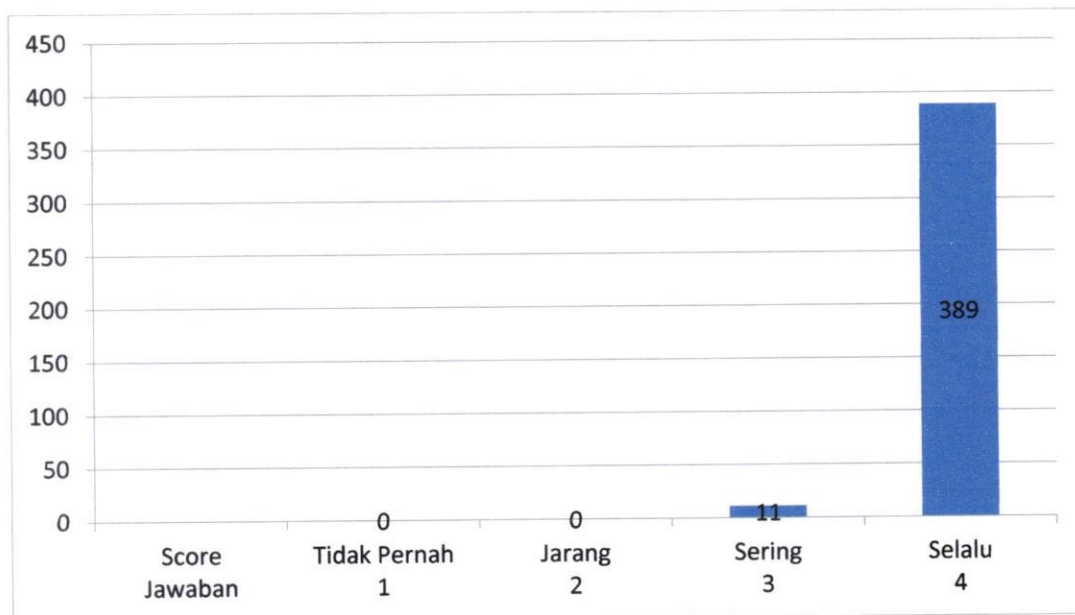
Nomor	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak Pernah	1	0	0
2	Jarang	2	0	0
3	Sering	3	11	2,75
4	Selalu	4	389	97,25
Jumlah			400	100

Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Gambar 4

**Indeks pada indikator Transaksi Biaya**



**5. Indikator Biaya Tambahan**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index **3,99**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Bersih dari Biaya Tambahan.

Tabel 5

**Indeks pada indikator Biaya Tambahan**

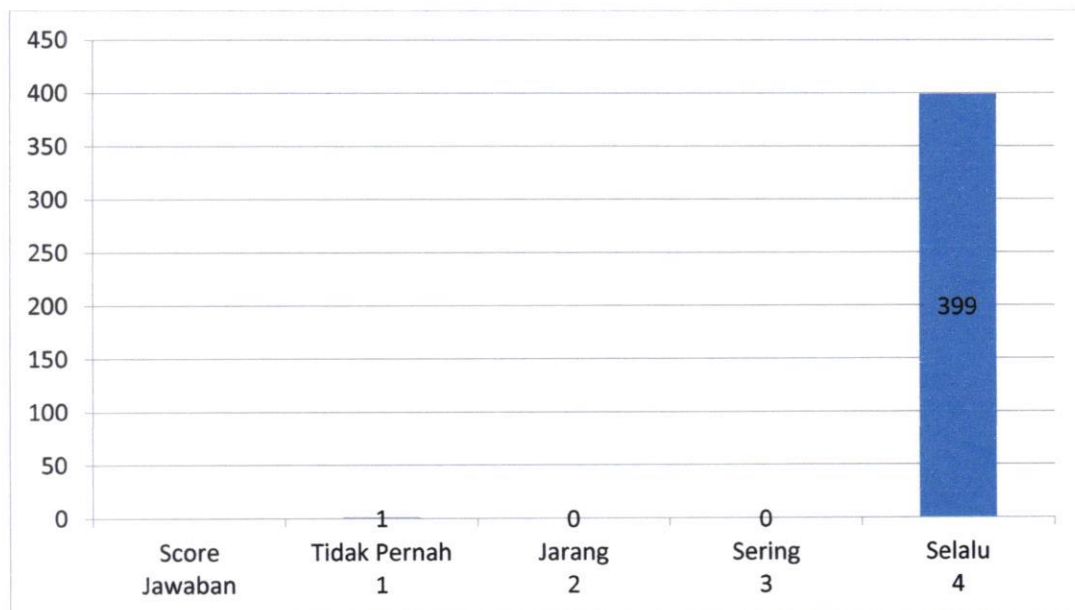
Nomor	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%

1	Tidak Pernah	1	1	0,25
2	Jarang	2	0	0
3	Sering	3	0	0
4	Selalu	4	399	99,75
Jumlah			400	100

Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)  
 Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Gambar 5

**Indeks pada indikator Biaya Tambahan**



## 6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index **4,00**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Bersih dari penerimaan Hadiah.

Tabel 6

**Indeks pada indikator Hadiah**

Nomor	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0

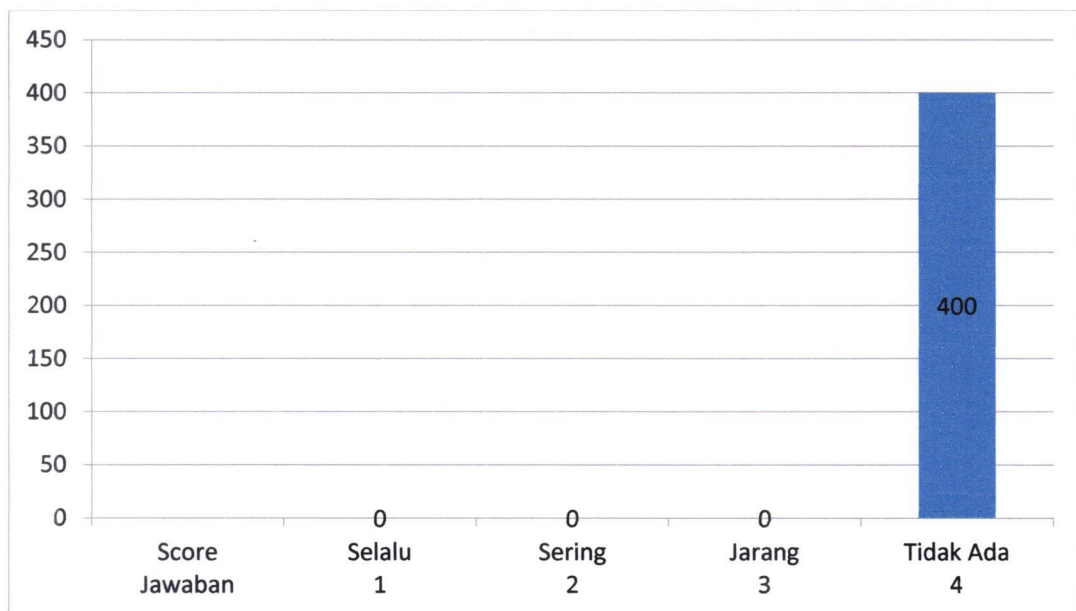
3	Jarang	3	0	0
4	Tidak ada	4	400	100
Jumlah			400	100

Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Gambar 6

**Indeks pada indikator Hadiah**



**7. Indikator Transparansi Biaya**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **4,00**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Bersih dari korupsi dalam memberikan Transparansi Biaya.

Tabel 7

**Indeks pada indikator Transparansi Biaya**

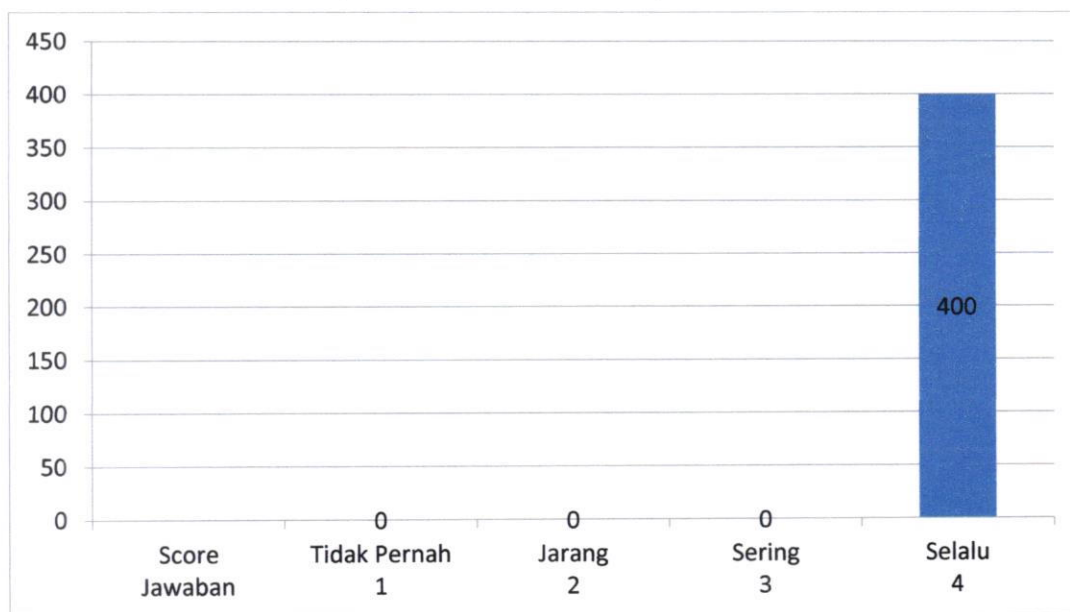
Nomor	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak Pernah	1	0	0
2	Jarang	2	0	0
3	Sering	3	0	0
4	Selalu	4	400	100

Jumlah	400	100
--------	-----	-----

Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)  
 Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Gambar 7

**Indeks pada indikator Transparansi Biaya**



**8. Indikator Percaloan**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index **3,99**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pengadilan Negeri Pontianak Bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel 8

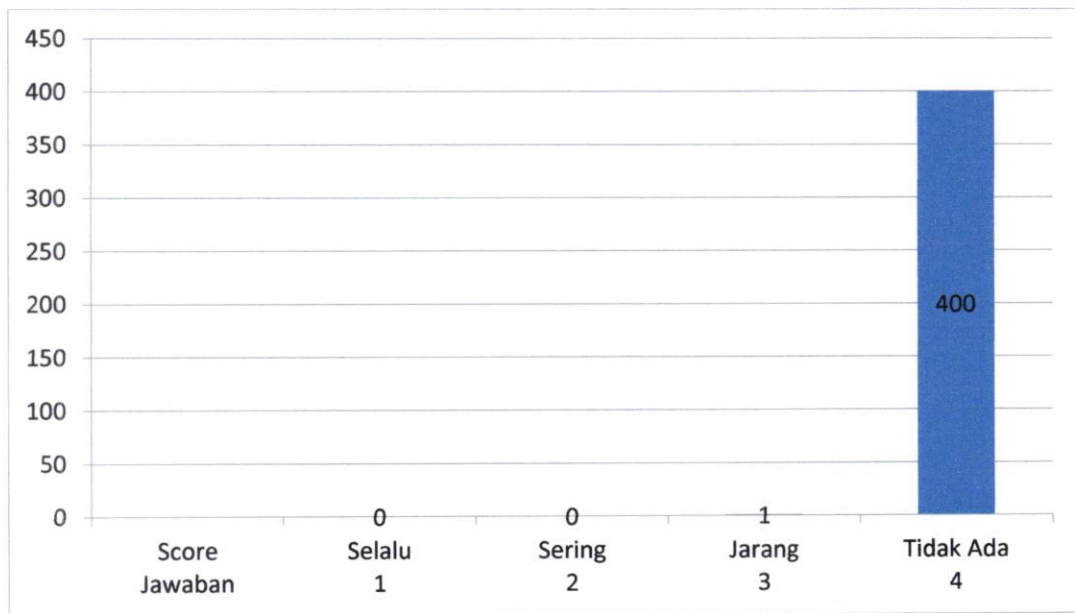
**Indeks pada indikator Percaloan**

Nomor	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	1	0,25
4	Tidak Ada	4	399	99,75
Jumlah			400	100

Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)  
 Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis

berikut ini.

Gambar 8  
Indeks pada indikator Percaloan



## 9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index **3,99**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Bersih dari Perbuatan Curang.

Tabel 9

**Indeks pada indikator Perbuatan Curang**

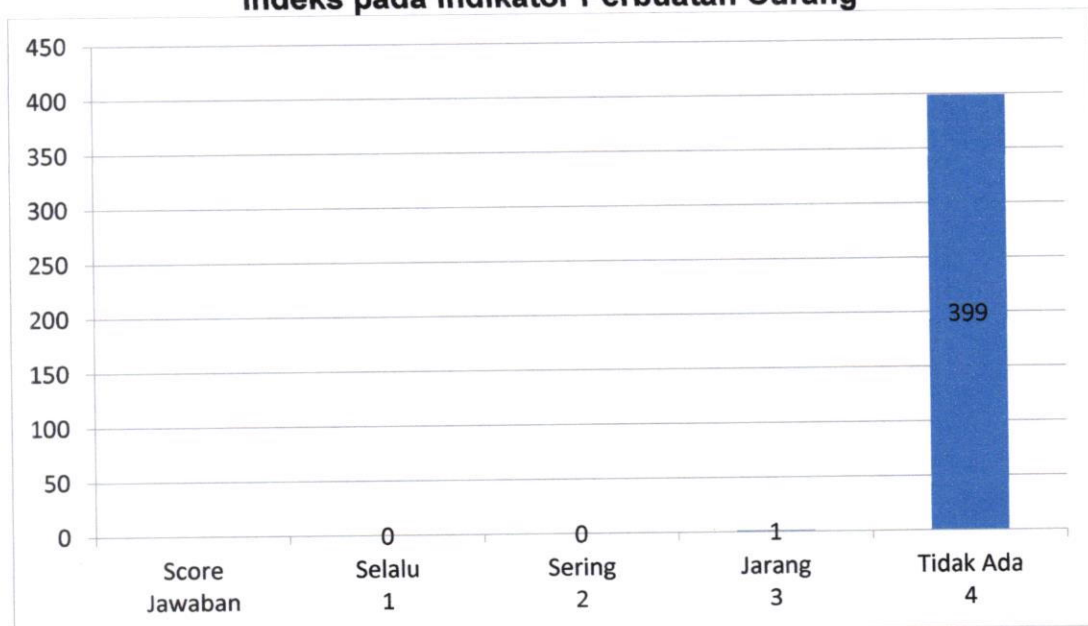
Nomor	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	1	0,25
4	Tidak ada	4	399	99,75
Jumlah			400	100

Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Gambar 9

**Indeks pada indikator Perbuatan Curang**



## 10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index **4,00**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pengadilan Negeri Pontianak Bersih dari Transaksi Rahasia.

Tabel 10

**Indeks pada indikator Transaksi Rahasia**

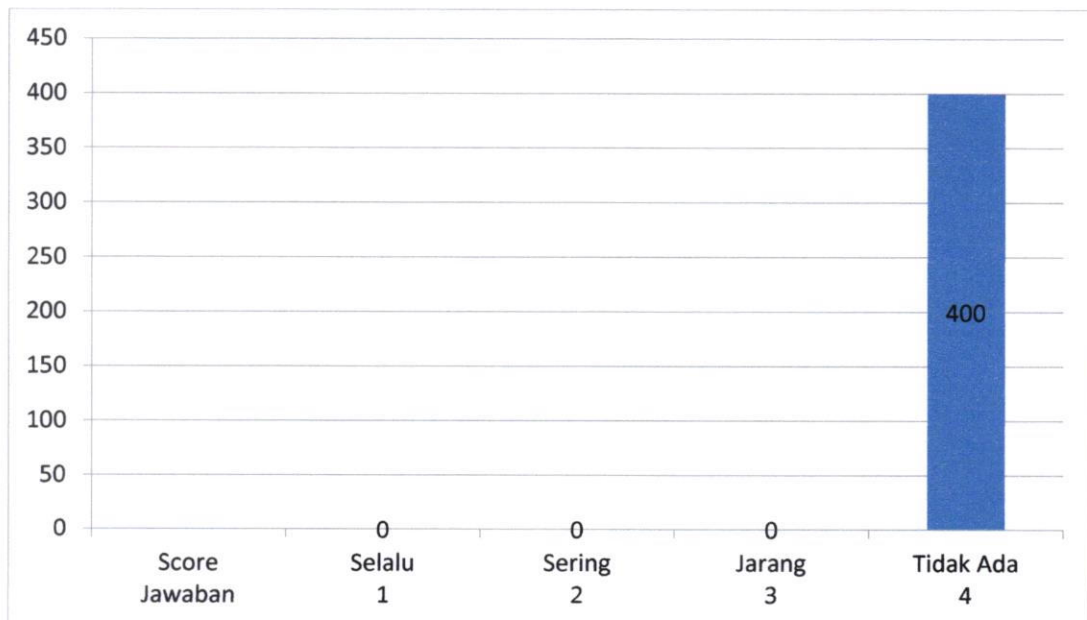
Nomor	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	0	0
4	Tidak ada	4	400	100
Jumlah			400	100

Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Gambar 10

**Tabel indeks pada indikator Transaksi Rahasia**



### C. Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Pontianak

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Pontianak sebesar **3,98 / 99,59%**

Tabel 11  
**Indeks Persepsi Anti Korupsi  
Pengadilan Negeri Pontianak**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
<b>4</b>	<b>3.26 – 4.00</b>	<b>81.26 – 100.00</b>	<b>4</b>	<b>Bersih dari korupsi</b>

Indeks Persepsi Anti Korupsi tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **81.26 – 100.00**.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Pontianak diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Pontianak memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,98 / 99,59%** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

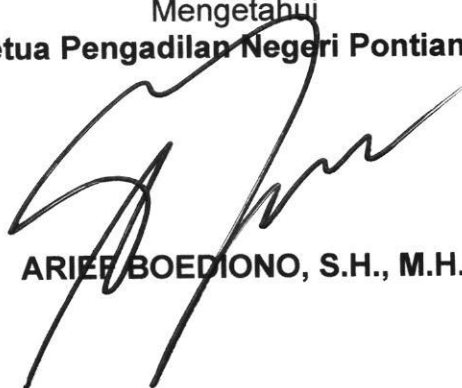
1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **4,00**.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks **3,99**.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks **4,00**.
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks **3,97**.

5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks **3,99**.
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks **4,00**.
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks **4,00**.
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks **3,99**.
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks **3,99**.
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks **4,00**.

## **B. Rekomendasi**

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pontianak bulan Januari 2025 sampai bulan Maret 2025 tersebut, menunjukkan mayoritas indikator memiliki indeks **3,98 / 99,59%** atau masuk pada persepsi **Bersih dari Korupsi**. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa Indikator Transaksi Biaya, Indikator Penyalahgunaan Jabatan dan Indikator Biaya Tambahan memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya. Perlu adanya perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik serta komitmen Pengadilan Negeri Pontianak untuk menuju **Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani**.

Mengetahui  
**Ketua Pengadilan Negeri Pontianak**



**ARIEF BOEDIONO, S.H., M.H.**